AMANAH DAYA NUSANTARA
Together Guarding Our Sacred Trust



Laporan Hasil Kegiatan

Workshop Konsolidasi Aksi Iklim Lintas Iman

Dari Dialog Menuju Aksi Kolaboratif:
Membangun Gerakan Ekologi Lintas Agama
yang Berkelanjutan

Hutan Kota By Plataran,
10 Juni 2026

Daftar Isi

LAPORAN HASIL KEGIATAN WORKSHOP KONSOLIDASI AKSI IKLIM LINTAS IMAN 1

A. LATAR BELAKANG 2

B. TUJUAN KEGIATAN 5

C. LUARAN YANG DIHARAPKAN 6

D. PELAKSANAAN KEGIATAN 7

E. HASIL DISKUSI KELOMPOK 8

KELOMPOK 1 8

KELOMPOK 2 10

KELOMPOK 3 11

F. HASIL PANEL 13

1. Prinsip Dasar yang Disepakati 14

2. Masukan dan Usulan Struktur 14

3. Struktur Forum yang Disepakati 14

G. PENUTUP 15



A. Latar Belakang

Krisis iklim telah menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia, dengan dampak yang semakin nyata dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam hal ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, dan peningkatan frekuensi bencana alam. Di tengah keterbatasan kapasitas pemerintah dan sektor swasta dalam merespons krisis ini, respons terhadap krisis iklim tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan teknokratis negara atau mekanisme pasar semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktor-aktor sosial yang memiliki legitimasi moral dan kedekatan dengan masyarakat akar rumput, termasuk komunitas keagamaan.

Sebagai negara dengan tingkat religiositas yang tinggi, Indonesia memiliki modal sosial yang sangat besar dalam membangun gerakan ekologis berbasis nilai-nilai agama. Institusi keagamaan memiliki jaringan yang luas melalui rumah ibadah, lembaga pendidikan, organisasi sosial-keagamaan, komunitas adat, hingga kelompok perempuan dan pemuda. Melalui jaringan tersebut, agama tidak hanya berfungsi sebagai sumber nilai spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang mampu membentuk perilaku kolektif, menggerakkan solidaritas sosial, serta mendorong perubahan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Workshop ini merupakan puncak dari rangkaian enam Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan sejak Maret hingga Mei 2026 dengan enam komunitas agama di Indonesia. Rangkaian FGD sebelumnya telah berhasil mengumpulkan data dan rekomendasi yang kaya mengenai praktik baik, tantangan, dan peluang kolaborasi aksi iklim berbasis agama. Kegiatan konsolidasi ini dirancang untuk "menjahit" seluruh masukan tersebut menjadi kesepakatan bersama yang konkret dan terukur.

Kegiatan workshop konsolidasi ini dilandasi oleh lima dasar pemikiran strategis yang saling terkait dan memperkuat urgensi kolaborasi lintas iman dalam merespons krisis iklim di Indonesia.

Pertama, hasil riset AYANA di Pulau Jawa yang melibatkan lebih dari 4.000 responden mengungkapkan temuan yang sangat signifikan, yakni 70% masyarakat Indonesia tidak memahami krisis iklim secara mendalam. Meskipun masyarakat di kota-kota besar dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki pemahaman, pengetahuan mereka masih berada di permukaan dan belum menyentuh esensi persoalan. Lebih memprihatinkan lagi, masyarakat di wilayah pedesaan yang justru merasakan langsung dampak krisis iklim, seperti petani yang mengalami gagal panen

dan nelayan yang kehilangan tangkapan, sama sekali tidak memahami krisis yang sedang mereka hadapi. Namun di tengah rendahnya literasi iklim ini, terdapat satu temuan penting: tokoh agama memiliki tingkat kepercayaan tertinggi di masyarakat. Fakta ini menjadikan komunitas agama sebagai pintu masuk yang paling efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai iklim dengan menggunakan bahasa-bahasa sederhana serta mengedepankan budaya dan tradisi lokal, alih-alih menggunakan jargon-jargon internasional yang sulit dipahami oleh akar rumput.

Kedua, setiap tradisi agama di Indonesia memiliki fondasi teologis yang kuat dan kokoh untuk mendukung aksi iklim dan perlindungan lingkungan. Komunitas Islam menekankan konsep *khalifah fil ardh*, yaitu manusia sebagai pemimpin dan penjaga bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam, sebagaimana diperkuat melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang perubahan iklim dan perlindungan lingkungan hidup. Komunitas Kristen Protestan menyoroti konsep *stewardship of creation*, yang memandang bahwa manusia



adalah pengelola ciptaan Tuhan yang diberi amanah untuk menjaga dan merawat bumi secara bertanggung jawab, sehingga kerusakan lingkungan dipahami bukan hanya sebagai persoalan ekologis, tetapi juga sebagai kegagalan moral manusia dalam menjalankan tanggung jawab ilahiah. Komunitas Katolik banyak merujuk pada konsep *integral ecology* yang dipopulerkan melalui ensiklik Laudato Si' oleh Paus Fransiskus, yang memandang kerusakan lingkungan, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan krisis kemanusiaan sebagai persoalan yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara holistik. Komunitas Hindu mengembangkan pendekatan berbasis *Tri Hita Karana*, khususnya prinsip *Palemahan* yang menekankan pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam, di mana alam dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan harus dijaga sebagai bagian dari keseimbangan kosmis. Komunitas Buddha menegaskan pentingnya *karuna* atau welas asih, interdependensi, dan pengendalian keserakahan sebagai dasar etika ekologis, di mana kerusakan lingkungan dipahami sebagai akibat dari keserakahan dan hilangnya

kesadaran mengenai keterhubungan seluruh makhluk hidup. Adapun komunitas Konghucu menempatkan prinsip harmoni (*He*) dan tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang sebagai bagian dari kewajiban etis untuk menjaga keseimbangan sosial dan keberlanjutan kehidupan antargenerasi. Kesamaan nilai-nilai teologis ini menjadi fondasi yang sangat kuat bagi kolaborasi lintas iman.

Ketiga, terdapat momentum strategis yang sangat mendukung penguatan gerakan ekologi lintas iman di Indonesia. Dukungan kebijakan nasional telah terwujud melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 yang menetapkan ekoteologi sebagai prioritas strategis Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap penguatan nilai-nilai ekologis dalam kehidupan beragama. Selain itu, momentum global juga sangat menguntungkan, sebagaimana tercermin dalam Deklarasi Istiqlal yang merupakan ikon kolaborasi lintas iman antara Paus Fransiskus dan Menteri Agama Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi simbol nyata bahwa persoalan ekologis dapat menjadi titik temu kemanusiaan bersama di tengah keragaman agama dan menjadi pintu masuk strategis untuk advokasi kebijakan yang lebih luas.

Keempat, meskipun berbagai program lingkungan berbasis agama telah berkembang di berbagai daerah di Indonesia, seperti eco-pesantren, green church, eco-vihara, green dharma, bank sampah, sedekah sampah, eco-enzyme, penanaman mangrove, konservasi sumber air, penghijauan rumah ibadah, pertanian organik, pengelolaan sampah berbasis komunitas, pendidikan ekoteologi, hingga advokasi masyarakat adat, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara ideal dan implementasi. Gerakan-gerakan tersebut masih bersifat sporadis, lokal, dan sangat bergantung pada figur individu atau komunitas tertentu, sehingga sulit direplikasi dan dipertahankan dalam jangka panjang. Fatwa dan ajaran agama tentang lingkungan telah ada, namun praktik di lapangan belum konsisten. Selain itu, masih terdapat pendekatan pembangunan yang mengatasnamakan transisi hijau tetapi tetap mengorbankan masyarakat adat, lingkungan hidup, dan kelompok rentan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas, pendampingan yang berkelanjutan, dan pelembagaan gerakan agar tidak bergantung pada figur individu semata.

Kelima, kesadaran akan urgensi kolaborasi lintas iman semakin menguat di kalangan komunitas agama. Berbagai inisiatif kolaboratif seperti Eco-Bhinneka, Interfaith Rainforest Initiative (IRI), GreenFaith, Faith to Action Network, dan Deklarasi Lintas Agama telah menunjukkan bahwa persoalan ekologis dapat menjadi titik temu kemanusiaan bersama di tengah keragaman agama di Indonesia. Bahkan, IRI Indonesia telah berhasil mempertemukan delapan dewan keagamaan dan menggerakkan 61 pemimpin muda yang siap menjadi agen perubahan iklim. Namun demikian, kolaborasi-kolaborasi tersebut masih belum terlembaga secara sistematis dan strategis, serta belum berjalan secara berkelanjutan. Para peserta FGD secara konsisten merekomendasikan perlunya pembentukan ruang konsolidasi bersama yang mampu mempertemukan komunitas lintas agama secara setara untuk berbagi praktik baik, memperkuat koordinasi, membangun advokasi kebijakan bersama, mengonsolidasikan data dan dampak program, serta merumuskan agenda aksi kolektif yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Kelima dasar pemikiran strategis ini secara bersama-sama menegaskan bahwa sudah saatnya gerakan ekologi berbasis agama di Indonesia bertransformasi dari gerakan parsial menjadi gerakan kolektif lintas iman yang terorganisir dan berkelanjutan. Dengan modal sosial, jaringan, dan legitimasi moral yang dimiliki oleh enam komunitas agama resmi di Indonesia, kolaborasi ini berpotensi menjadi model global *faith-based climate action* yang efektif dan berkeadilan. Workshop konsolidasi ini merupakan wujud nyata dari transformasi tersebut, yang dirancang untuk menjahit seluruh masukan dari rangkaian FGD sebelumnya menjadi kesepakatan bersama yang konkret, terukur, dan implementatif.



B. Tujuan Kegiatan

1 Membangun pemahaman bersama lintas komunitas agama mengenai krisis iklim sebagai persoalan moral, sosial, dan spiritual yang membutuhkan aksi kolektif.

2 Memperkuat pertukaran perspektif teologis, pengalaman, dan praktik baik aksi iklim berbasis agama dari enam komunitas agama di Indonesia.

3 Merumuskan agenda aksi bersama lintas iman yang konkret, terukur, dan implementatif dalam bidang pendidikan ekologis, pengelolaan lingkungan, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat.

4 Mendorong terbentuknya mekanisme koordinasi atau forum kolaboratif lintas iman yang berkelanjutan untuk memperkuat komunikasi, sinergi program, dan konsolidasi gerakan aksi iklim berbasis agama.

5 Memperkuat posisi komunitas agama sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong kebijakan publik yang pro-lingkungan dan berkeadilan ekologis.

6 Mendorong keterlibatan aktif generasi muda, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam gerakan aksi iklim lintas iman.



C. Luaran yang Diharapkan

Tersusunnya dokumen rekomendasi aksi bersama lintas iman yang memuat program-program prioritas kolaboratif dalam aksi iklim berbasis komunitas.

Terbentuknya kesepakatan awal mengenai mekanisme koordinasi nasional aksi iklim berbasis agama, baik dalam bentuk forum, jaringan kolaboratif, maupun sekretariat bersama.

Tersusunnya rencana tindak lanjut (RTL) jangka pendek dan menengah yang mencakup agenda kegiatan bersama, pembagian peran, dan indikator implementasi.

Teridentifikasinya peluang kolaborasi lintas sektor antara komunitas agama, pemerintah, NGO, akademisi, media, dan sektor swasta.

Terdokumentasikannya hasil diskusi, rekomendasi, praktik baik, dan komitmen bersama dalam bentuk laporan kegiatan, notulensi, dan dokumentasi visual.



D. Pelaksanaan Kegiatan

Workshop Konsolidasi Aksi Iklim Lintas Iman diikuti oleh 20 orang peserta perwakilan dari 6 komunitas agama. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan makan siang bersama yang berlangsung hingga pukul 13.00 WIB, memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berinteraksi secara informal sebelum memasuki sesi inti.

Sesi pertama dibuka dengan sambutan dari Rizal Algamar, Direktur Eksekutif AYANA, yang memaparkan latar belakang dan tujuan konsolidasi. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pendekatan berbasis nilai dan budaya lokal dengan prinsip dasar bahwa program ini didesain dari kita untuk kita, bukan intervensi dari pihak luar. Setelah itu, Prof. Amelia Fauzia dari STF UIN Jakarta menyampaikan pemaparan hasil enam FGD sebelumnya yang mencakup temuan kunci tentang program lingkungan unggulan, landasan teologis masing-masing agama, persamaan lintas iman, tantangan bersama, peluang, serta rekomendasi program yang telah diidentifikasi.

Sesi kedua merupakan inti dari workshop, yakni diskusi panel selama satu jam. Peserta dibagi ke dalam tiga kelompok untuk mendiskusikan tiga pertanyaan kunci: program prioritas yang dapat dilaksanakan bersama dalam enam bulan ke depan, mekanisme koordinasi dan pembagian peran antar komunitas, serta bentuk advokasi yang paling mendesak untuk disuarakan kepada pemerintah. Setiap kelompok difasilitasi oleh tim STF UIN Jakarta.

Sesi ketiga adalah pleno, di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Sesi ini merumuskan kesepakatan bersama yang akan menjadi dasar tindak lanjut. Kegiatan ditutup dengan deklarasi bersama komitmen aksi iklim dan foto Bersama.





E. Hasil Diskusi Kelompok

Kelompok 1

Kelompok 1 terdiri dari sepuluh peserta yang mewakili enam komunitas agama, yaitu Romo Marthen dan RP Adrianus Suyadi dari Katolik, Budiana Setiawan dan Dewa Gede Ginada dari Hindu, Pdt. Saud A. Singalingging dan Ria Claudia Watulingas dari Kristen, Rini Antika dari Konghucu, Dr. Zulfi Amri dan Farah dari Islam, serta Tristina dari Buddha. Diskusi kelompok ini berlangsung dinamis dan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting.

Program Prioritas Bersama

Kelompok 1 memulai diskusi dengan menelaah empat usulan program yang telah direkomendasikan dari rangkaian FGD sebelumnya. MUI menyatakan dukungan penuh terhadap Program 1, yakni Gerakan Nasional Rumah Ibadah Ramah Lingkungan Lintas Iman, dengan mencontohkan implementasi melalui eco-house of worship yang telah berjalan di berbagai daerah. PGI dan KWI secara tegas memprioritaskan Program 2, yaitu Sekretariat Bersama Forum Nasional Aksi Iklim Lintas Iman, dengan argumen bahwa setiap agama telah memiliki rumah ibadah masing-masing sehingga yang paling dibutuhkan saat ini adalah wadah koordinasi bersama lintas iman. WALUBI memandang Program 4, Filantropi Hijau Lintas Iman, sebagai program yang paling realistis karena membutuhkan dukungan pendanaan dari umat. Sementara itu, PHDI menekankan pentingnya Program 3, Pemuda Lintas Iman untuk Keadilan Iklim, sebagai penggerak regenerasi yang akan menjadi tulang punggung sekretariat bersama.

Muhammadiyah memberikan pandangan yang menarik dengan mengusulkan tahapan implementasi yang berbeda, yakni memulai dari Filantropi Hijau sebagai fondasi akses pendanaan, kemudian membangun Sekretariat Bersama, dan terakhir menggerakkan Gerakan Nasional melalui anak muda. Meskipun terdapat perbedaan prioritas antar lembaga, diskusi yang konstruktif menghasilkan kesepakatan bahwa Program 3 penting sebagai penggerak awal, sementara Program 1 dinilai paling realistis untuk diimplementasikan.

Program prioritas yang disepakati oleh Kelompok 1 adalah:

1. Sekretariat Bersama Forum Nasional Aksi Iklim Lintas Iman
2. Gerakan Nasional Rumah Ibadah Ramah Lingkungan Lintas Iman

Mekanisme Koordinasi Lintas Iman

Kelompok 1 mencapai sejumlah kesepakatan penting mengenai mekanisme koordinasi. Pertama, forum tidak akan membentuk organisasi baru agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan. Kedua, wadah koordinasi berbentuk forum lintas iman yang bersifat setara, tanpa hierarki antar agama maupun lembaga. Ketiga, AYANA berperan sebagai leading sector, fasilitator komunikasi strategis, dan jembatan antara lembaga agama dan pemerintah.

Mengenai struktur forum, MUI mengusulkan adanya Presidium sebagai mekanisme kepemimpinan bersama. PHDI mengusulkan agar forum tetap berada di bawah payung AYANA dengan Sekretariat Bersama diposisikan sebagai perluasan peran AYANA untuk merangkul seluruh lembaga agama. PGI menekankan perlunya struktur organisasi yang jelas dan keterlibatan perwakilan lembaga berdasarkan persetujuan pimpinan masing-masing. KWI mengusulkan bentuk forum sebagai payung besar yang di dalamnya terdapat Board, Presidium, dan Office/ Sekretariat. Muhammadiyah mengusulkan agar program-program prioritas menjadi Kelompok Kerja dengan focal point dan tim kerja, serta diperlukan Dewan Pembina untuk fungsi monitoring.

Pokok-pokok kesepakatan Kelompok 1:

- Tidak membentuk organisasi baru
- Wadah koordinasi berbentuk forum lintas iman
- AYANA berperan sebagai leading sector, fasilitator komunikasi strategis, dan jembatan antar lembaga agama dan pemerintah
- Forum bersifat setara, tanpa hierarki
- Keanggotaan berbasis lembaga, bukan individu
- Keputusan strategis melibatkan pimpinan AYANA dan pimpinan enam lembaga agama
- Forum dapat didukung melalui mekanisme kontribusi/iuran masing-masing lembaga
- Nama yang diusulkan: Forum Iklim Lintas Iman (Interfaith Climate Forum)

Struktur forum yang disepakati:

Presidium/Council
(Dewan Pembina dan Pengarah)

Sekretariat
(dikoordinasikan oleh AYANA)

Kelompok Kerja
Pokja Gerakan Nasional Rumah Ibadah Ramah Lingkungan, Pokja Filantropi Hijau, Pokja Pemuda Lintas Iman, dan Pokja Advokasi (usulan)

Bentuk Advokasi

Kelompok 1 mengidentifikasi delapan isu prioritas advokasi, yaitu regulasi lingkungan hidup yang berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup, tata ruang dan tata guna lahan perkotaan, perlindungan taman nasional dan kawasan konservasi, pengelolaan sampah, penggunaan anggaran publik yang lebih bijaksana dan berpihak pada keberlanjutan, perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam isu lingkungan, penguatan hubungan antara lingkungan hidup dan hak asasi manusia serta pelestarian hutan, dan pengetatan kebijakan serta pengawasan terhadap praktik yang merusak lingkungan. Kelompok ini merekomendasikan pembentukan Pokja Advokasi sebagai bagian dari Forum Iklim Lintas Iman untuk mengawal isu kebijakan, regulasi, dan perlindungan lingkungan hidup secara bersama.

Kelompok 2

Kelompok 2 terdiri dari sembilan peserta yang mewakili berbagai komunitas agama, yaitu Sr. Irene dari Katolik, Ketut Budiyanto dari Hindu, Pdt. Johan Kristantara dari Kristen, Peter Lesmana dan Aldi Destian dari Konghucu, Apridon Rusadi dan Ustadz Usman dari Islam, Wantie Bellina dari Buddha, serta Ajeng dari Katolik. Diskusi kelompok ini berlangsung dengan pendekatan yang sangat praktis dan berorientasi pada tindakan nyata.

Program Prioritas Bersama

Kelompok 2 memulai diskusi dengan meriviu empat program yang diusulkan. Pdt. Johan menyampaikan bahwa rumah ibadah lintas iman dapat diwujudkan secara konkret melalui gereja ramah lingkungan, masjid ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Beliau juga menekankan pentingnya membangun sekretariat aksi iklim lintas iman sebagai wadah untuk mewujudkan program-program lainnya, termasuk program pemuda lintas iman dan inisiatif filantropi hijau.

Sr. Irene dari KWI memaparkan pengalaman nyata yang telah dilakukan oleh gereja Katolik dalam mewujudkan gereja ramah lingkungan, termasuk penyediaan fasilitas yang ramah anak-anak dan disabilitas, penghapusan bunga potong untuk dekorasi, serta penerapan ceklis untuk menilai apakah sebuah gereja sudah ramah lingkungan atau belum. Beliau menekankan bahwa rumah ibadah jangan menjadi tempat sampah dan sampah sebaiknya dibawa pulang oleh jemaat. Yosefine dari KWI menambahkan bahwa rumah ibadah ramah lingkungan dapat dikembangkan menjadi rumah ibadah yang tanggap bencana, mengingat ketika terjadi bencana, masyarakat di sekitar biasanya mencari tempat evakuasi terdekat yang salah satunya adalah rumah ibadah.

WALUBI berpendapat bahwa program yang paling realistis adalah rumah ibadah ramah lingkungan, dan membangun sekretariat bersama dinilai lebih realistis daripada mengumpulkan dana filantropi. PHDI menyatakan bahwa rumah ibadah ramah lingkungan adalah prioritas pertama karena akan berdampak hingga ke rumah tangga masing-masing, diikuti sekretariat bersama iklim dan pemuda peduli iklim lintas agama. MATAKIN menyoroti perlunya SOP untuk merumuskan tempat ibadah ramah lingkungan dan menilai program pemuda peduli iklim sebagai program yang realistis dan mendesak, meskipun tantangan utamanya adalah pendanaan. SDI mengedepankan sekretariat bersama sebagai prioritas utama karena masing-masing lembaga sudah bekerja secara mandiri dan membutuhkan wadah untuk menyatukan gerakan. MUI menekankan perlunya gerakan bersama untuk mengelola isu lingkungan menjadi isu agama dan kampanye ekoteologi.

Program prioritas yang disepakati oleh Kelompok 2:

1. Sekretariat Bersama Forum Nasional Aksi Iklim Lintas Iman
2. Gerakan Nasional Rumah Ibadah Ramah Lingkungan Lintas Iman
3. Filantropi Hijau Lintas Iman



Mekanisme Koordinasi Lintas Iman

Kelompok 2 menghasilkan sejumlah usulan praktis mengenai mekanisme koordinasi. MUI mengusulkan pembentukan pokja terlebih dahulu untuk menyusun modul bersama dan membentuk tim kerja, dengan output berupa SK, modul, dan SOP. Sr. Irene mengusulkan agar pertemuan koordinasi dapat dilakukan melalui Zoom dengan AYANA sebagai pengundang, dan sekretariat dapat bergantian tempat pertemuan. Pdt. Johan menanyakan kesiapan AYANA dalam menyediakan program coordinator karena program ini memerlukan orang-orang yang fokus, dan mengusulkan agar setiap agama menyumbangkan sumber daya manusia untuk hadir di setiap forum. SDI menekankan pentingnya regulator dari pemerintah dan perlunya undang-undang untuk memperjelas aksi bersama.

Pdt. Johan juga mengusulkan pembuatan deklarasi bersama sebagai ikatan awal yang dapat dipegang bersama dan disiarkan di website dan media sosial masing-masing lembaga. MUI memberikan masukan bahwa deklarasi sebaiknya disusun dari empat program yang berjalan sebagai bagian deklarasi. MATAKIN menegaskan bahwa deklarasi merupakan komitmen bersama, sementara SK akan menjadi output berikutnya, kemudian MoU, dan akhirnya perjanjian kerjasama. SDI menekankan bahwa yang terpenting adalah deklarasi terlebih dahulu, kemudian SK, MoU, dan akhirnya undang-undang.



Bentuk Advokasi

Kelompok 2 secara khusus menyoroti pentingnya regulasi bersama antara Menteri Agama dan Menteri Lingkungan Hidup tentang aksi bersama iklim lintas agama. Pdt. Johan menyatakan bahwa jika ada regulasi ini, dampaknya akan sangat besar. SDI menekankan bahwa pemerintah harus menjadi regulator dan perlunya undang-undang untuk memberikan kejelasan hukum bagi aksi bersama. MUI menambahkan bahwa pokja dapat mendorong pertemuan dengan pemerintah untuk membuat regulasi bersama, serta mendorong pembuatan khotbah-khotbah yang mengajarkan bahwa mengelola lingkungan adalah bagian dari agama.

Kelompok 3

Kelompok 3 terdiri dari sebelas peserta yang mewakili berbagai komunitas agama dan organisasi mitra, yaitu Sutarno dari Katolik, KRHT Astono Chandra Dana dari Hindu, Merawati dari Eco Enzym Hindu, Pdt. Sedihati Gea dan Jacky Wattimuri dari Kristen, Anggun Senjaya dan Novalia dari Konghucu, Hening Parlan, Ika Akmala, dan Rini dari Islam, serta Megawati dari Buddha. Diskusi kelompok ini memiliki karakteristik yang berbeda karena lebih fokus pada isu-isu operasional yang mendesak dan pendekatan berbasis akar rumput.

Program Prioritas Bersama

Kelompok 3 mengusulkan program-program prioritas yang sangat responsif terhadap kondisi lapangan dan isu-isu mendesak. Ibu Merawati menyoroti bahwa isu paling mendesak adalah peraturan gubernur tentang pemilahan sampah, karena mulai Agustus 2026, Bantar Gebang tidak akan menerima sampah organik. Beliau mengajak peserta untuk memilah sampah dari rumah masing-masing agar tidak sampai ke Bantar Gebang dan mereduksi gas metana. Sampah organik



dapat diolah menjadi eco-enzyme sehingga sampah plastik lebih mudah diolah untuk aspek ekonomi.

Pak Sutarno menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan bagi setiap umat beragama untuk memilah sampah. Beliau mengusulkan pendekatan tiga langkah: edukasi tentang tata kelola sampah, praktik baik pengelolaan sampah, dan kolaborasi antar agama serta antar generasi secara massif. Beliau juga menekankan pentingnya mengubah persepsi sampah dari negatif menjadi positif dengan pengelolaan yang benar melalui bank sampah atau gerakan kolektif pengumpulan sampah. Pdt. Gea menambahkan bahwa gaya hidup ramah lingkungan harus dimiliki oleh jemaat dan menjadi target mulai dari daerah terdekat.

Bu Hening mengingatkan bahwa problem bukan hanya sampah, tetapi juga perubahan iklim yang menyebabkan suhu panas ekstrem, sehingga diperlukan kerja multi-issue dengan kolaborasi lintas agama. Beliau mengusulkan tiga program: literasi lingkungan dan iklim (Interfaith Literasi), Green Livelihood dan Community Resilience untuk mengatasi dampak gas metana, serta Interfaith Community Climate Action melalui sekretariat bersama. Bu Rini menekankan bahwa fatwa tidak akan berarti jika tidak kembali ke diri sendiri; yang terpenting adalah gaya hidup menjaga lingkungan dari generasi ke generasi melalui aksi nyata seperti pengumpulan sampah, pengolahan minyak jelanta, dan penghijauan dengan tanaman produktif. Bu Ika menyoroti pentingnya peran anak muda dan konten digital yang viral di media sosial untuk menjangkau generasi muda, mengusulkan pendekatan kreatif seperti Faithwork dan kampanye sosialisasi massif. Nova juga menyoroti isu fast fashion sebagai salah satu hal yang harus dipedulikan karena mengikuti tren akan menghasilkan limbah.

Program prioritas yang direkomendasikan oleh Kelompok 3:

1. Edukasi Pengelolaan Sampah melalui pembentukan Kurikulum Lintas Generasi dan Lintas Iman
2. Green Livelihood dan Community Resilience dengan saling berbagi sumber daya
3. Interfaith Community Climate Action melalui sekretariat bersama
4. Policy and Knowledge Hub dengan kebijakan lintas sektor



F. Hasil Panel

Diskusi panel dimulai dengan penelaahan terhadap empat program yang telah direkomendasikan dari rangkaian FGD sebelumnya. Keempat program tersebut adalah Gerakan Nasional "Rumah Ibadah Ramah Lingkungan" Lintas Iman yang bertujuan mentransformasi rumah ibadah enam agama menjadi pusat edukasi dan aksi lingkungan berbasis komunitas; Sekretariat Bersama Forum Nasional Aksi Iklim Lintas Iman sebagai wadah koordinasi tetap untuk merumuskan strategi bersama, advokasi kebijakan, dan kolaborasi program secara sistematis; Program "Pemuda Lintas Iman untuk Keadilan Iklim" yang berfokus pada penguatan peran generasi muda sebagai agen perubahan iklim melalui pelatihan kepemimpinan ekologis dan aksi bersama; serta Inisiatif "Filantropi Hijau Lintas Iman" yang mengembangkan skema pembiayaan lingkungan berbasis keagamaan melalui zakat, infak, wakaf, persembahan suci, dan mekanisme pembiayaan inovatif lainnya.

Berdasarkan hasil diskusi ketiga kelompok yang disampaikan pada saat panel, program prioritas bersama yang disepakati adalah Sekretariat Bersama Forum Nasional Aksi Iklim Lintas Iman sebagai prioritas tertinggi.



1. Prinsip Dasar yang Disepakati

Seluruh kelompok mencapai kesepakatan yang kuat mengenai prinsip-prinsip dasar koordinasi. Pertama, forum tidak akan membentuk organisasi baru agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan. Kedua, wadah koordinasi berbentuk forum lintas iman yang bersifat setara, tanpa hierarki antar agama maupun lembaga. Ketiga, AYANA berperan sebagai leading sector atau penggerak utama, fasilitator komunikasi strategis, dan jembatan antara lembaga agama dan pemerintah. Keempat, keanggotaan Sekretariat Bersama berbasis lembaga, bukan individu, sementara individu terlibat melalui kelompok kerja sesuai bidang kerja masing-masing. Kelima, keputusan strategis melibatkan pimpinan AYANA dan pimpinan keenam lembaga agama. Keenam, forum dapat didukung melalui mekanisme kontribusi atau iuran dari masing-masing lembaga.

2. Masukan dan Usulan Struktur

Berbagai masukan mengalir untuk membentuk struktur forum yang efektif. Hasil panel mengusulkan agar forum tetap berada di bawah payung AYANA dengan Sekretariat Bersama diposisikan sebagai perluasan peran AYANA untuk merangkul seluruh lembaga agama. Keterlibatan perwakilan lembaga berdasarkan persetujuan pimpinan masing-masing, serta perlunya pertemuan lanjutan antara AYANA dan pimpinan lembaga agama. Sementara itu, program Filantropi Hijau, dan Pemuda Lintas Iman, rumah ibadah ramah lingkungan menjadi program kerjanya. Masing-masing lembaga agama dapat mendokumentasikan dan mengkomunikasikan program kepada publik melalui sekretariat. AYANA juga menjembatani komunikasi dengan Kementerian Agama, khususnya terkait penguatan ekoteologi dan sinergi dengan program pemerintah. Nama yang diusulkan untuk forum ini adalah Forum Iklim Lintas Iman atau Interfaith Climate Forum.

3. Struktur Forum yang Disepakati

Berdasarkan seluruh masukan, struktur forum yang disepakati terdiri dari tiga tingkatan. Tingkat pertama adalah Presidium atau Council yang berfungsi sebagai Dewan Pembina dan Pengarah yang terdiri dari pimpinan enam lembaga agama dan pimpinan AYANA. Tingkat kedua adalah Sekretariat yang dikoordinasikan oleh AYANA sebagai pelaksana program sehari-hari. Tingkat ketiga adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari Pokja Gerakan Nasional Rumah Ibadah Ramah Lingkungan, Pokja Filantropi Hijau, Pokja Pemuda Lintas Iman, dan Pokja Advokasi sebagai usulan tambahan.

Panel juga menyepakati untuk membuat deklarasi Bersama yang dilakukan pada saat itu juga yang diikuti oleh semua peserta workshop. Diakhir panel menyepakati redaksi deklarasi yang kemudian dibacakan oleh Pak Rizal (Direktur AYANA) diikuti oleh semua peserta. Peserta kemudian menandatangani deklarasi sebagai bentuk nyata komitmen mereka.





G. Penutup

Workshop Konsolidasi Aksi Iklim Lintas Iman pada 10 Juni 2026 telah berhasil menghasilkan kesepakatan bersama yang konkret dan terukur. Seluruh peserta menyatakan komitmen untuk melanjutkan kolaborasi ini dengan semangat kebersamaan dan kesetaraan.

Workshop Konsolidasi ini merupakan momentum untuk mengubah pendekatan aksi iklim dari gerakan parsial menjadi gerakan kolektif lintas iman yang terorganisir. Dengan modal sosial, jaringan, dan legitimasi moral yang dimiliki oleh enam komunitas agama resmi di Indonesia, kolaborasi ini berpotensi menjadi model *global faith-based climate action* yang efektif dan berkeadilan.



Together Guarding Our Sacred Trust

amanahdaya.org

©2026